

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah suatu proses bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dengan melalui pengembangan perekonomiannya di daerahnya. Tolak ukur keberhasilan pembangunan disuatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Sehingga dapat dikatakan bahwa prioritas dari pembangunan adalah menghilangkan kemiskinan (Todaro 2000).

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa merasakan dan menikmati pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai pendidikan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi, dan yang lebih parahnya lagi kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan dan sandang secara terbatas, kemiskinan juga telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak (Sahdan 2005).

Menurut Bank Dunia (dalam Wijayanto 2010), salah satu sebab kemiskinan yaitu kaena kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar

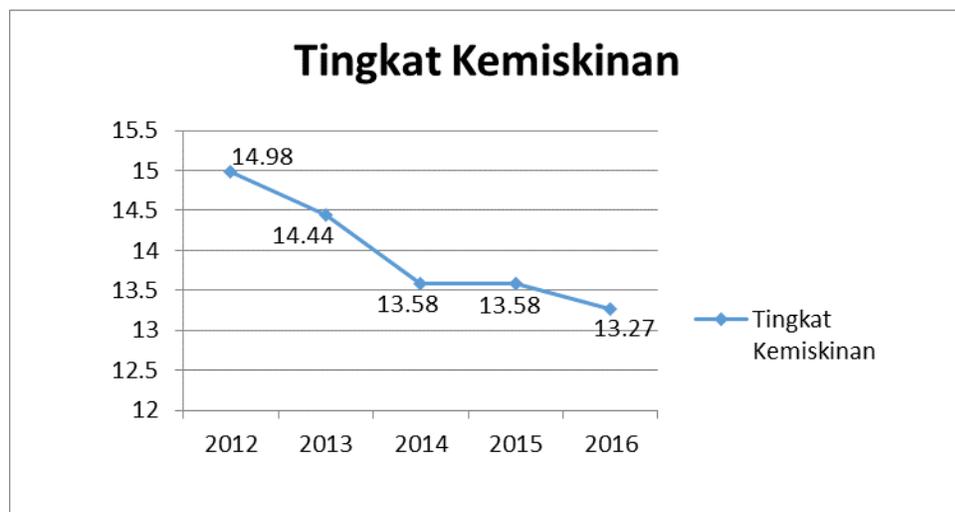
seperti: makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Kemiskinan bisa juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya kurang memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, dan masalah yang lainnya yang berkaitan dengan kemiskinan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya telah ditetapkan dan pembangunan daerah dilakukan secara berkesinambungan sesuai prioritas, keberhasilan pembangunan nasional menjadi salah satu indikator utama untuk penurunan jumlah penduduk miskin (Suliswanto,2010).

Kemiskinan merupakan kondisi yang absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, maupun struktural. Pandangan ini memperlihatkan luasnya cakupan tentang dimensi kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks dan bersifat mendorong berbagai upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir, 2008).

Di Jawa Tengah, menurut data *Statistic Jawa Tengah* tingkat kemiskinan pada periode tahun 2012-2016 terlihat mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan dimana mencapai 14.98 persen. Dan pada tahun berikutnya secara berturut-turut mengalami penurunan yaitu di tahun 2013 yaitu sebesar 14.44 persen, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 13.58 persen pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan masih stabil seperti tahun sebelumnya sebesar 13.58 persen, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 13.27 persen di Tahun 2016. Meskipun tingkat kemiskinan mempunyai kecenderungan menurun setiap tahunnya di Jawa Tengah termasuk masih cukup tinggi, perkembangannya dapat di lihat pada Grafik 1.1.

**Grafik 1.1**  
**Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2012 - 2016**



Sumber: BPS, Jateng dalam Angka tahun 2012-2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup masih tinggi diantaranya Kabupaten Brebes pada periode tahun 2012-2016 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 364.900 jiwa pada tahun 2012 dan kemudian menurun menjadi sebanyak 348.000 jiwa pada tahun 2016, kemudian diikuti oleh Kabupaten Banyumas yang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 304.000 jiwa pada tahun 2012 dan juga mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 283.900 jiwa, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Cilacap yang memiliki jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi yaitu sebanyak 260.900 jiwa pada tahun 2012 dan mengalami penurunan penduduk miskin yang cukup signifikan yaitu sebanyak 240.200 jiwa pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, 2017)

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Lima Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**  
**Tahun 2012-2016 (ribu jiwa)**

Kabupaten di Jawa Tengah	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Banyumas	304	296,8	283,5	285,9	283,9
Kabupaten Brebes	<b>364,9</b>	<b>367,8</b>	<b>355,1</b>	<b>352</b>	<b>348</b>
Kabupaten Cilacap	260,9	255,7	239,8	243,1	240,2
Kabupaten Kebumen	258,5	251,1	242,3	241,9	235,9
Kabupaten Purbalingga	181,4	181,1	176	176,5	171,8

Sumber: Badan Pusat Statistik

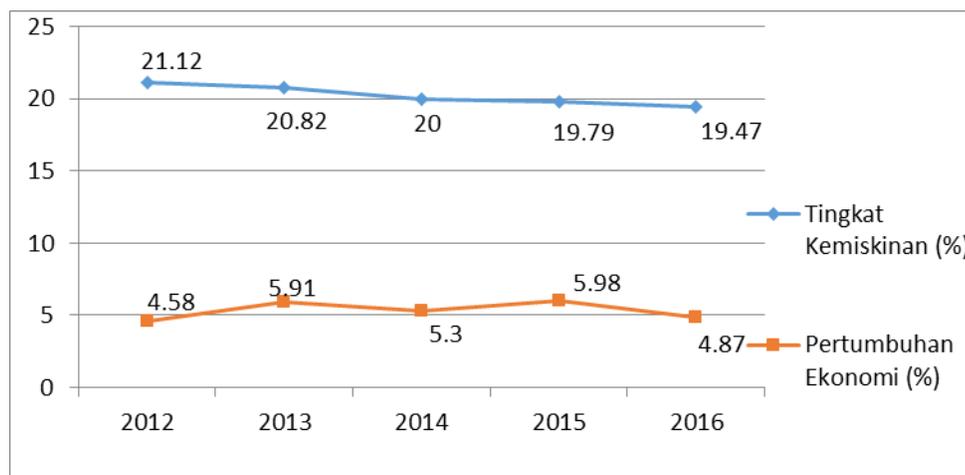
Untuk menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat mengetahui kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes antara lain (1) pertumbuhan ekonomi; (2) upah minimum; (3) tingkat pengangguran, dan (4) tingkat pendidikan (Hartono dan Aziz dalam Hudaya, 2009).

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang erat, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tolak ukur kinerja perekonomian dalam suatu wilayah, akan tetapi belum pasti tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingginya juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah yang masih tinggi tingkat kemiskinannya dan pembangunan ekonominya (Siregar, Wahyuni 2008).

Selain pertumbuhan ekonomi, upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kebijakan penetapan upah oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan untuk jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Jika kehidupan hidup minimum dapat terpenuhi maka kesejahteraan pekerja meningkat dan terbebas dari jerat kemiskinan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No:Per-01/Men/1999)

Grafik 1.2 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes. Pertumbuhan ekonominya adalah merupakan proses dimana suatu perekonomian dapat berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan didalamnya kemungkinan terjadi penurunan ataupun kenaikan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes selama tahun 2012-2016 menunjukkan trend yang positif yang cenderung meningkat, dan presentase tingkat kemiskinan yang cenderung menurun setiap tahunnya. Dari gambar diatas tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan persentase kemiskinan yang ada di Kabupaten Brebes. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu berkisar di angka 5 persen, dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes masih cukup tinggi yaitu berkisar 21 persen dari jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik,2017)

**Grafik 1.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Brebes**  
**Tahun 2012-2016 (persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (2012-2016)

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau dilakukan. Namun dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah (Pasal 90 ayat 1 UU No.13/2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003). Setiap pekerja buruh berhak mendapatkan atau memperoleh yang mereka dapatkan dari penghasilan yang didapat untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 Ayat 1 No. 13/2003).

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pekerja atau buruh untuk mendapatkan layak hidup, baik fisik, non fisik, dan social selama satu bulan. Seorang pekerja/buruh dapat dikatakan hidup layak jika upahnya mampu memenuhi kebutuhan 3000 kalori per hari, oleh karena itu KHL menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Ada beberapa komponen KHL yang selalu dihitung, yaitu makanan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan (Peraturan Menteri Nomor 17, Tahun 2005 (Per-17/Men/VIII/2005)).

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sampai tahun 2016 tingkat upah minimum di Kabupaten Brebes terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tingkat upah minimum di Kabupaten Brebes hanya sebesar 775.000 rupiah, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 859.000 rupiah dan di tahun 2014 menjadi 1.000.000 rupiah dan mengalami kenaikan upah kembali pada tahun 2015 menjadi 1.166.550 rupiah, Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2016 menjadi 1.310.000 rupiah. Walaupun di Kabupaten Brebes upah minimumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi Kabupaten Brebes dalam penetapan upahnya masih tergolong rendah, ini dikarenakan upah minimum yang masih rendah dibawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Brebes. Salah satu aspek penting dalam melihat kinerja perkembangan selain upah minimum adalah melihat efektivitas penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang banyak dan tersedia (Badan Pusat Statistik,2016).

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK)di Kabupaten Brebes**  
**Tahun 2012-2016 (Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>UMK</b>	<b>KHL</b>
2012	775.000,00	827.883,00
2013	859.000,00	895.000,00
2014	1.000.000,00	1.023.644,00
2015	1.166.550,00	1.166.583,00
2016	1.310.000,00	1.309.908,00

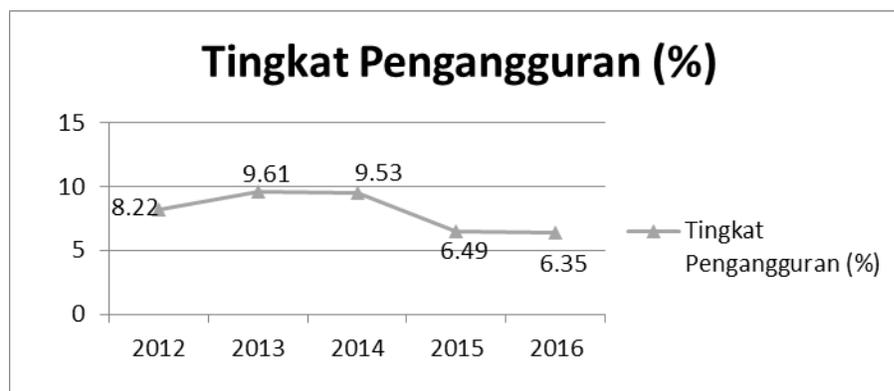
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Brebes Dalam Angka

Dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan adalah sama pentingnya dalam suatu daerah, ketika masyarakat tidak menganggur dan memiliki penghasilan maka penghasilan tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika kebutuhannya bisa terpenuhi maka kemiskinan bisa berkurang, dan diharapkan tingkat pengangguran menjadi rendah dengan adanya kesempatan kerja tinggi, maka tingkat kemiskinan pun akan semakin rendah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat, masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru di bidang ekonomi maupun non ekonomi, pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan dan memicu munculnya kemiskinan (Sumarsono, 2009)

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya dapat memunculkan kemiskinan yang tinggi juga. Pengangguran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan, salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan, pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan mengurangi efek pendapatan masyarakat, dan hal tersebut akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai, semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan, persoalan pengangguran memang menjadi salah satu target kebijakan pembangunan di setiap negara. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan berbagai upaya pembangunan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan (Sukirno, 2010).

Grafik 1.3 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Brebes masih tergolong tinggi. Ketenagakerjaan adalah merupakan salah satu bidang dalam pembangunan yang memerlukan perhatian khusus dan serius dari berbagai pihak, masalah ketenagakerjaan yang paling besar adalah masalah tingginya angka pengangguran. Dimana terjadi pengangguran yang cukup tinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,22 persen. Tingkat pengangguran di Kabupaten Brebes tidaklah stabil, mengalami beberapa kali fase fluktuasi yang terjadi, dimana pada tahun 2013 tingkat pengangguran di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan mencapai 9,61 persen dan kemudian pada tahun berikutnya turun menjadi 9,53 persen, dan kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai 6,49 persen tingkat pengangguran di Kabupaten Brebes, ini menjadikan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes serius dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2017)

**Grafik 1.3**  
**Tingkat Pengangguran di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes 2012-2016

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa sampai tahun 2016 jumlah tingkat pendidikan di Kabupaten Brebes terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2012 tingkat pendidikan di Kabupaten Brebes mencapai 2531 jiwa ditingkat SMA/SLTA, kemudian mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 2958 jiwa pada tahun 2016. Kemudian pada tingkat pendidikan D2 di Kabupaten Brebes mengalami penurunan dimana pada tahun 2012 tingkat pendidikan D2 mencapai 2687 jiwa, lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai 1485 jiwa pada tahun 2016. Selanjutnya tingkat pendidikan D3 di Kabupaten Brebes juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2012 tingkat pendidikan nya mencapai 849 jiwa, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 mencapai 658 jiwa. Pada tahapan tingkat pendidikan D4/S1 selalu mengalami kenaikan yang cukup tinggi dimana pada tahun 2012 mencapai 5494 jiwa, hingga pada tahun 2016 mencapai 7485 jiwa. Selanjutnya pada tingkatan jenjang pendidikan S2 mengalami kenaikan dimana pada 2012 mencapai 282 jiwa, dan pada tahun 2016 mencapai 465 jiwa.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Tingkat Pendidikan di Kabupaten Brebes**  
**Tahun 2012-2016 (jiwa)**

Tingkat Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
SMA/SLTA	2531	2257	2396	2748	2958
D2	2687	2175	1742	1467	1485
D3	849	865	868	591	658
D4/S1	5494	5958	6173	6986	7485
S2	282	318	377	417	465

Sumber: BPS, Kabupaten Brebes Dalam Angka

Dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan di Kabupaten Brebes, maka pemerintah setempat bisa membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kabupaten Brebes, dengan semakin banyaknya lulusan tingkat pendidikan yang semakin tinggi ini bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor indikasi untuk bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Brebes tersebut.

Pendidikan adalah aspek dan pionir dalam pembangunan masa depan suatu daerah dan bangsa, pendidikan sendiri menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Setiap negarta yang ingin maju maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas yang utama karena pendidikan merupakan sarana untuk menghapus kebodohan serta kemiskinan (Wiguna,2013).

Persoalan kemiskinan memang menjadi salah satu target dalam kebijakan pembangunan negara, untuk mengatasi masalah kemiskinan perlu berbagai upaya untuk pembangunan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan itu. Usaha yang dilakukan dalam pembangunan tersebut dapat dilihat dari bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah dalam suatu negara.

Oleh karena itu belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah bisa disalurkan dalam sektor pembangunan yang meliputi sector pendidikan, kesehatan, sehingga masyarakat dapat menikmati dari manfaat pembangunan daerah dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah maka sebagai peneliti tertarik untuk menganalisis masalah ini, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten, sehingga bisa sebagai tolak ukur untuk kebijakan dalam usaha mengatasi kemiskinan. Maka dari uraian pemikiran diatas peneliti memilih judul “ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, TINGKAT PENGANGGURAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 1996-2016”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan?
5. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca tentang bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang ada di Kabupaten maupun Provinsi.
2. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat oleh peneliti maupun pembaca.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya

## E. Metode Analisis Data

### E.1 Alat Dan Model Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Adapun persamaan model ekonometrikanya adalah sebagai berikut:

$$\text{HOP}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Gr}_t + \beta_2 \text{LogMW}_t + \beta_3 \text{LogUEMP}_t + \beta_4 \text{LogEDUC}_t + \beta_5 \text{LogGEXP}_t + \mu_i$$

Di mana:

HOP	= Kemiskinan
Gr	= Pertumbuhan Ekonomi
MW	= Upah Minimum
UEMP	= Tingkat Pengangguran
EDUC	= Tingkat Pendidikan
GEXP	= Pengeluaran Pemerintah
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien regresi
$t$	= Tahun ke $t$
$\mu_i$	= Variabel Gangguan ( <i>disturbance term</i> )

### E.2 Jenis Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder periode waktu 1996-2016 dalam bentuk runtut waktu (*time series*) yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data kuantitatif yang dikumpulkan melalui studi *literature* baik buku, jurnal penelitian, serta dapat di peroleh melalui situs Badan Pusat Statistik (BPS).

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dan kemiskinan di Kabupaten Brebes rumusan masalah, tujuan dan manfaa penelitiab, serta sistematika penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan landasan teori tentang, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan serta pengeluaran pemerintah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi opersional, jenis dan sumber data, dan metode analisis.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyekn penelitian, yaitu kondisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum,

tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Brebes, analisis data dan pembahasan.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini di sampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN